

**TESIS**

**PENYULUHAN HUKUM OLEH NOTARIS DALAM PENERAPAN  
ASAS PROPORSIONALITAS PADA AKTA PERJANJIAN YANG DIBUAT  
DIHADAPANNYA**

**(Studi pada Kantor Notaris di Bangkinang)**



**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2024**

**PENYULUHAN HUKUM OLEH NOTARIS DALAM PENERAPAN ASAS  
PROPORSIONALITAS PADA AKTA PERJANJIAN YANG DIBUAT DIHADAPANNYA  
(Studi pada Kantor Notaris di Bangkinang)**

(Muzakqi Junanda, 2220123002, Fakultas Hukum, Unand, 2024, 105 Halaman)

Pembimbing : Dr. M. Hasbi, SH., MH Dr. Yasniwati SH.,MH

**ABSTRAK**

Selain melaksanakan tugas profesi utamanya yang berkaitan dengan pembuatan akta, notaris juga berwenang melakukan penyuluhan hukum. Pada umumnya, penyuluhan hukum dilakukan kepada khalayak luas dan materi hukum yang disampaikan beragam. Namun, dalam UUJN terdapat paling tidak 2 (dua) pembatasan. *Pertama*, *audience* atau penerima penyuluhan hanyalah kalangan tertentu saja, yaitu para penghadap yang akan dibuatkan akta, sehingga lebih berupa semacam konsultasi. *Kedua*, materi yang disampaikan juga terbatas, yakni seputar akta yang akan dibuat saja, sehingga Notaris tidak dapat dikatakan memberi penyuluhan hukum secara umum. Penyuluhan hukum juga diberikan untuk memenuhi asas-asas dalam perjanjian. Salah satu asas dimaksud adalah asas proporsionalitas. Asas proporsionalitas merupakan sebuah asas yang menggambarkan adanya keseimbangan hak dan kewajiban bagi pada pihak dalam suatu perjanjian, salah satu contohnya yaitu perjanjian kemitraan oleh peternak ayam dengan perusahaan inti, dalam kasus ini peternak ayam tidak dapat memenuhinya terhadap yang diperjanjikan walaupun sudah dilakukannya penyuluhan hukum oleh notaris sebelum dilakukannya penandatanganan akta, Tujuan Penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui 1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban notaris terhadap akta perjanjian yang dibuat dihadapannya tidak memenuhi asas proporsionalitas, meskipun telah memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak dan 2) Untuk Mengetahui Perlindungan Hukum bagi Pihak yang dirugikan terhadap Akta yang dibatalkan oleh Pengadilan karena Tidak Memenuhi Asas Proporsionalitas. Metode yang digunakan ialah yuridis empiris. hasil penelitian Sebagaimana tidak terpenuhinya asas proporsionalitas bukan merupakan sebuah tanggung jawab Notaris yang diatur melalui peraturan perundang-undangan. Namun, secara moralitas Notaris dapat memenuhi asas proporsionalitas melalui sebuah kewenangan yaitu penyuluhan hukum. Memenuhi keseluruhan saran hukum dari Notaris juga bukan merupakan sebuah kewajiban bagi para penghadap. Sehingga kesalahan yang muncul atas tidak terpenuhinya asas proporsionalitas bukan menjadi tanggung jawab Notaris. Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat perjanjian kemitraan yang tidak adil menjadi sorotan utama. Perjanjian baku yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain, seperti yang terjadi dalam kasus ini, jelas bertentangan dengan asas keadilan dan prinsip perlindungan konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan payung hukum yang kuat bagi konsumen untuk menggugat klausula perjanjian yang merugikan dan menuntut ganti rugi.

Kata kunci : peran dan fungsi notaris, asas proposionalitas, penyuluhan hukum

***The Role of Notaries in Applying the Principle of Proportionality in Deeds of Agreement  
Made in Their Presence***

***(A Study at the Notary Office in Bangkinang)***

(Muzakqi Junanda, 2220123002, Faculty of Law, University of Andalas, 2024, 105 Pages)

Supervisors: Dr. M. Hasbi, SH., MH and Dr. Yasniwati SH., MH

**ABSTRACT**

*In addition to their primary professional duties related to the creation of deeds, notaries also have the authority to provide legal counseling. Generally, legal counseling is provided to a wide audience, and the legal materials presented are varied. However, the Indonesian Notary Act imposes at least two limitations. First, the audience or recipients of counseling are limited to specific parties, namely those who will have a deed made, making it more like a consultation. Second, the material presented is also limited, namely to the deed that will be made, so the notary cannot be said to provide general legal counseling. Legal counseling is also provided to fulfill the principles in an agreement. One of these principles is the principle of proportionality. The principle of proportionality is a principle that describes the balance of rights and obligations between the parties to an agreement. One example is a partnership agreement between a poultry farmer and a core company, in this case, the poultry farmer is unable to fulfill his obligations as agreed upon even though legal counseling has been carried out by the notary before the deed was signed. The purpose of this study is: 1) To determine the notary's responsibility for deeds of agreement made in their presence that do not meet the principle of proportionality, even though they have provided legal counseling to the parties; and 2) To determine legal protection for parties who are harmed by deeds that are revoked by the court for failing to meet the principle of proportionality. The method used is a juridical empirical method. The results of the study show that the failure to meet the principle of proportionality is not the responsibility of the notary as regulated by law. However, morally, the notary can fulfill the principle of proportionality through the authority of legal counseling. Fulfilling all legal advice from the notary is also not an obligation for the parties. Thus, the error that arises from the failure to meet the principle of proportionality is not the responsibility of the notary. Legal protection for parties harmed by unfair partnership agreements is the main focus. Standard-form contracts that benefit one party and harm the other, as in this case, are clearly contrary to the principles of justice and consumer protection. The Consumer Protection Law provides a strong legal umbrella for consumers to sue for damages to detrimental contractual clauses and to claim compensation.*

***Keywords: role and function of notary, principle of proportionality, legal counseling***